

**IBUKOTA KABUPATEN SOLOK:
DARI SOLOK KE AROSUKA
1956-2009**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Panitia Ujian Sarjana Fakultas Sastra Universitas Andalas
guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sejarah*

Oleh:

MERI MARLINA
03 181 048



**JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SAstra
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

ABSTRAK

Penulisan ini mendiskripsikan tentang sejarah pemerintahan Kabupaten Solok dengan fokus penelitian pada pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) dan dampak pemindahan Ibukota kepada masyarakat sekitar. Sesuai dengan fokus penelitian maka penulisan ini diberi judul **Ibukota Kabupaten Solok: Dari Solok ke Arosuka (1956-2009)**.

Penulisan ini dilakukan melalui penelitian dengan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah meliputi empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan sumber baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber-sumber ini berupa arsip, dokumen dan sumber lisan. Sumber arsip berasal dari instansi pemerintah daerah yang terkait dalam pemindahan Ibukota Kabupaten Solok, sebagai salah satu arsip adalah Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka). Sumber lisan didapatkan melalui wawancara dengan tokoh pemerintah yang terlibat langsung dalam pemindahan ibukota Kabupaten Solok dan masyarakat sekitar yang wilayahnya dijadikan pusat pemerintahan/ibukota. Kesemua sumber yang diperoleh dikritik secara intern menyangkut keaslian (otentisitas) dan ekstern yang berkenaan dengan (kredibilitas) sumber. Berikutnya dilakukan interpretasi yakni proses merangkai fakta-fakta menjadi kesatuan makna dan selanjutnya dilakukan penulisan sejarah atau yang disebut historiografi.

Penulisan ini menggambarkan tentang pemerintahan Kabupaten Solok sejak terbentuk tahun 1956 hingga tahun 2009. Fokus kajian adalah proses pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah baru yaitu Kotobaru Kecamatan Kubung. Pemindahan pusat pemerintahan di tahun 1980 dikarenakan kebutuhan mendesak untuk kantor pemerintahan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemindahan tersebut juga dilakukan sehubungan dengan meningkatnya status Nagari Solok menjadi Kotamadya pada tahun 1970, sehingga sejak waktu itu pusat pemerintahan Kabupaten Solok berada dalam wilayah Kotamadya Solok.

Pada tahun 2004, pusat pemerintahan dan Ibukota Kabupaten Solok kembali dipindahkan ke wilayah baru yaitu Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) sehubungan dengan tidak memungkinkan lagi mengembangkan perkantoran di Kotobaru. Pemindahan pusat pemerintahan ke Kotobaru, diterima masyarakat Kotobaru dengan baik sehubungan adanya harapan bagi pengembangan pembangunan di wilayah mereka. Namun, masyarakat Kotobaru akhirnya merasa kecewa ketika pusat pemerintahan dan Ibukota Kabupaten Solok dipindahkan ke Kayu Aro-Sukarami. Sedangkan masyarakat Kayu Aro-Sukarami dengan senang hati menyumbangkan lahan (tanah ulayat) mereka untuk pembangunan ibukota pemerintahan. Dampak positif dari pemindahan ibukota kepada masyarakat adalah semakin ramainya wilayah, dibangunnya fasilitas umum (publik) serta memberi kesempatan berkembang kepada masyarakat dari segi sosial dan ekonomi. Sedangkan dampak negatif adalah masyarakat kehilangan lahan produktif, terganggunya saluran irigasi, dan adanya kecemburuan sosial karena masyarakat pendatang lebih menikmati hasil dari pemindahan ibukota tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Solok dibentuk pada tahun 1956 dalam lingkungan propinsi Sumatera Tengah¹, dengan ibukotanya Solok. Solok merupakan salah satu nagari dalam Kabupaten Solok.² Hal itu berlangsung sampai tahun 1970 ketika Solok ditingkatkan statusnya sebagai sebuah kotamadya. Sejak saat itu pusat pemerintahan Kabupaten Solok berada dalam wilayah pemerintahan Kotamadya Solok.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Kotamadya Solok maka pada tahun 1979 Kantor Bupati Kabupaten Solok dipindahkan dari Kotamadya Solok ke Nagari Kotobaru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Pemindahan pusat pemerintahan ini terjadi pada masa pemerintahan Bupati Hasan Basri. Nagari Kotobaru berjarak sekitar empat kilometer dari pusat Kota Solok arah ke selatan. Bupati Hasan Basri menyarankan daerah Kotobaru sebagai pusat pemerintahan berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kantor pemerintahan (bupati).³ Kebutuhan mendesak tersebut dilihat dari posisi kantor bupati masih berada dalam lingkungan pemerintah Kotamadya Solok. Pertimbangan lain dari pemindahan ibukota ini adalah karena gedung kantor bupati peninggalan kolonial sudah tidak memadai lagi, baik dari kapasitas maupun kelayakannya.⁴

¹ *Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom dalam lingkungan propinsi Sumatera Tengah.*

² *Ibid.*

³ *Wawancara dengan Bapak Hasan Basri, Bupati Solok periode 1975-1985 (dua periode) di Cupak pada tanggal 15 Juli 2010.*

⁴ *Arsip Pemerintah Kabupaten Solok, Kronologis Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok, 2005.*

Sejak tahun 1980 sebagian besar perkantoran pemerintahan Kabupaten Solok telah dipindahkan ke Kotobaru. Meskipun demikian secara formal Ibukota Kabupaten Solok masih Solok. Pusat pemerintahan Kabupaten Solok di Kotobaru ini, relatif tidak bertahan lama, pada tahun 1997 pada masa pemerintahan Gamawan Fauzi digagas untuk memindahkan lagi pusat pemerintahan Kabupaten Solok dengan pertimbangannya antara lain:

1. Lahan yang tersedia untuk mengembangkan wilayah perkantoran sangat terbatas.
2. Sulitnya koordinasi antar unit kerja pemerintahan Kabupaten Solok karena sebagian perkantorannya masih ada di Kota Solok.

Setelah dipertimbangkan maka daerah yang dipilih sebagai ibukota yang baru dari Kabupaten Solok terletak di dua jorong, Jorong Kayu Aro dan Jorong Sukarami. Daerah ini terletak \pm 25 kilometer dari pusat Kota Solok. Daerah ini relatif strategis karena terletak di jalur Lintas Sumatera arah ke selatan menuju Padang, di samping terletak di pertigaan arah ke Alahan Panjang, daerah penghasil *holtikultura* Kabupaten Solok.

Pemindahan ibukota Kabupaten Solok ke Kayu Aro-Sukarami berdasarkan pemikiran dan pemahaman tentang fungsi ibukota, yakni sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan, dan pusat pengembangan wilayah.⁵ Dengan pertimbangan tersebut, sebaiknya ibukota Kabupaten Solok tidak berada dalam wilayah pemerintahan lain (Kotamadya Solok). Di samping itu, pemindahan ibukota juga bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mengembangkan pembangunan di Kabupaten Solok.

⁵ *Ibid*, hal. 1.

BAB V KESIMPULAN

Kabupaten Solok terbentuk berdasarkan UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Berdasarkan UU tersebut ditetapkan Solok sebagai Ibukota Kabupaten Solok. Pada saat itu, Kabupaten Solok terdiri dari 12 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan X Koto Di Atas, X Koto Singkarak, Kubung, IX Koto Sungai Lasi, Payung Sekaki, Bukit Sundi, Lembang Jaya, Gunung Talang, Lembah Gumanti, Pantai Cermin, Sungai Pagu dan Sangir serta 83 Nagari.

Pada tahun 1970, ibukota Kabupaten Solok berkembang dan ditetapkan menjadi sebuah kotamadya dengan nama Kotamadya Solok berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 1970. Sejak waktu itu ibukota Kabupaten Solok berada dalam wilayah Kotamadya Solok.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Kotamadya Solok maka pada tahun 1979 Kantor Bupati Kabupaten Solok dipindahkan dari Kotamadya Solok ke Nagari Kotobaru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Nagari ini berjarak sekitar lima kilometer dari pusat Kota Solok arah ke selatan. Perkembangan lain dari pemindahan ibukota ini adalah karena gedung kantor bupati peninggalan kolonial sudah tidak memadai lagi, baik dari kapasitas maupun kelayakannya.

Sejak tahun 1980 sebagian besar perkantoran pemerintahan Kabupaten Solok telah dipindahkan ke Kotobaru. Meskipun demikian secara formal Ibukota Kabupaten Solok masih disebut di Solok. Pusat pemerintahan Kabupaten Solok di Kotobaru ini, relatif tidak bertahan lama, pada tahun 1997 pada masa pemerintahan Gamawan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. ARSIP

Arsip Pemerintah Daerah Kota Solok yang berisi "*Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1970*" Tentang Peresmian Kotamadya Solok.

Arsip Pemerintah Kabupaten Solok yang berisi "*Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah*".

Arsip Pemerintah Kabupaten Solok yang berisi: *Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka)*.

Arsip Pemerintah Kabupaten Solok yang berisi tentang *Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Kota Solok ke Kayu Aro Sukarami (Arosuka), 2005*.

Arsip Nagari Koto Baru yang berisi tentang *Surat Persetujuan Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Solok dari Solok ke Koto Baru, 1977*.

Arsip Pemerintah Kabupaten Solok yang berisi tentang *Ekspose Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka), 2005*.

Arsip Pemerintah Kabupaten Solok yang berisi tentang *Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Ibukota Kabupaten Solok*.

Monografi Nagari Koto Baru Tahun 2008.

Monografi Nagari Koto Gaek Tahun 2007.

Monografi Nagari Koto Gaek Tahun 2008

Profil Kabupaten Solok Tahun 2007, Arosuka: Pemerintah Kabupaten Solok, 2007.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

B. BUKU

Alfan Miko (ed.), *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Padang: Andalas University Press, 2006.

Bustanul Arifin (ed.), *Tingkok Nagari Dalam Masyarakat Adat Kabupaten Solok*, Arosuka: LKAAM Kabupaten Solok, 2006.